



**STRATEGY DIRECTING KEPALA DESA DALAM PENDATAAN
PENERIMA PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA SEI
ROTAN**

Sri Rezekina¹, Dedi Amrizal²

Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email : srirezekina01@gmail.com

Abstract

This study aims to explain and describe the village head's directing strategy in collecting data on Family Hope Program (PKH) recipients in Sei Rotan Village. The purpose of this study was to find out the strategy of directing village heads in collecting data on beneficiaries of the Family Hope Program (PKH) in Sei Rotan Village. The research method used is descriptive with qualitative data analysis, namely research with data collection techniques through interview techniques by making humans as instruments and adjusted to reasonable situations in relation to data collection which are generally qualitative in nature. Based on the results of this study, the directing strategy carried out by the village head in collecting data on PKH beneficiaries was relatively good. There are 4 strategic directing methods carried out by the village head, namely: There is giving orders in the Family Hope Program (PKH), there is delegation of some authority by the leadership, there is directing activity by the leadership, giving motivation from the leadership. From what the village head did, it can be seen from the way the village head directed the hamlet head to collect data and inform about PKH assistance. For problems, there are still people who do not get quotas to become recipients of PKH assistance and the difference in the nominal amount still needs to be coordinated with the social services.

Keywords: *Strategy Directing, Directing, Family Hope Program (PKH)*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan tentang strategy directing kepala desa dalam pendataan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sei Rotan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana strategy directing kepala desa dalam pendataan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sei Rotan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan analisis data kualitatif, yaitu penelitian dengan teknik pengumpulan data melalui teknik wawancara dengan menjadikan manusia sebagai instrument dan di sesuaikan dengan situasi yang wajar dengan kaitannya dengan pengumpulan data pada umumnya bersifat kualitatif. Berdasarkan hasil dari penelitian ini adalah strategy directing yang dilakukan kepala desa dalam pendataan penerima bantuan PKH relatif baik. Terdapat 4 cara strategy directing yang dilakukan kepala desa yaitu : Adanya pemberian perintah dalam Program Keluarga Harapan (PKH), adanya pelimpahan sebagian wewenang oleh pimpinan, adanya aktivitas pengarahan oleh pimpinan, pemberian motivasi dari pimpinan. Dari yang dilakukan kepala desa bisa dilihat dari cara kepala desa

Strategy Directing Kepala Desa Dalam Pendataan...

Rezekina S, Amrizal D (2024)

mengarahkan kepala dusun untuk melakukan pendataan dan menginformasikan tentang bantuan PKH. Untuk permasalahan masih ada masyarakat yang tidak mendapatkan kuota menjadi penerima bantuan PKH dan perbedaan jumlah nominal masih perlu di koordinasikan kepada dinas sosial.

Kata Kunci : Strategy Directing, Pengarahan, Program Keluarga Harapan (PKH)

PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah masalah sosial yang di alami oleh masyarakat disebabkan oleh faktor ekonomi. Masalah kemiskinan tidak hanya ada di negara berkembang seperti indonesia, tetapi juga di alami oleh negara-negara maju. Kemiskinan yang ada di Indonesia merupakan masalah yang senantiasa relevan untuk dikaji terus menerus. Karena, salah satu faktor yang mempengaruhi kesejahteraan sosial adalah kemiskinan (Sinurat, 2023). Ini bukan karena masalah kemiskinan telah ada sejak lama dan masih hadir di tengah-tengah kita saat ini. Gejala yang ditimbulkan semakin meningkat sejalan dengan krisis multidimensional yang masih dihadapi bangsa Indonesia.

Hal ini juga dikarenakan Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang dengan jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahun, sehingga tingkat kesejahteraan rakyatnya masih jauh di bawah tingkat kesejahteraan negara-negara maju. Kemiskinan digambarkan dengan kondisi seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya seperti, sandang, pangan dan papan. Secara garis besar kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kemiskinan yaitu faktor internal, yaitu faktor yang muncul dari manusia itu sendiri seperti lemahnya etos kerja yang terlihat dalam sikap malas, kerja tidak teratur, dan tidak bergairah. Kedua, faktor non-individual yaitu penyelenggara pemerintahan yang korup dan sejenisnya, yang menyalahgunakan tenaga rakyat untuk kebobrokan birokrasi yang merugikan. Ketiga, visi teologi yang represif. Faktor ini terlihat berkembang luas ditengah masyarakat beragama, yaitu adanya kecenderungan sebagian umat beragama memperlakukan kemiskinan sebagai suatu yang telah menjadi suratan takdir dan kepastian yang datang dari tuhan.

Dalam hal ini pemerintah sangat berperan penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bahkan upaya pemerintah dalam memutus mata rantai kemiskinan sudah banyak di dukung oleh aturan, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin. Pada era kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I, pemerintah menetapkan penanggulangan kemiskinan salah satu prioritas pembangunan. Prioritas pada penanggulangan kemiskinan dilanjutkan oleh KIB II.

Maka, salah satu upaya pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan yang berada di Indonesia yaitu salah satunya dengan membuat Program Keluarga Harapan (Ayun et al., 2021).

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah suatu program yang memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga sangat miskin (RSTM), jika telah memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Kedudukan PKH merupakan bagian dari program-program penanggulangan kemiskinan lainnya. PKH dijalankan sebagai pelaksanaan dari UU no. 40 tahun 2004 tentang jaminan sosial. Inpresno. 3 tahun 2010 tentang program pembangunan yang berkeadilan. Lalu Permensos Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di dalam permansos ini juga menjelaskan urutan pelaksana yang dilakukan sehingga bantuan sosial seperti PKH sampai kepada masyarakat. Pelaksana PKH daerah dilakukan oleh dinas sosial daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang menangani Bantuan Sosial PKH, perlindungan, dan jaminan sosial.

Pelaksana PKH daerah provinsi bertanggung jawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasi PKH di daerah kabupaten/kota. Pelaksana daerah PKH daerah kabupaten/kota bertanggung jawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasi PKH di kecamatan. Pelaksana PKH daerah kecamatan bertanggung jawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasi PKH di kelurahan/desa. Lalu untuk melanjutkan pelaksanaan PKH dalam permansos di atas dilanjutkan dengan surat keterangan dari Dinas Sosial No.460/2916/2022 perihal dukungan penyaluran BNBA BLT BBM, BPNT, PKH tambahan. Dalam surat ini dijelaskan kecamatan mengkoordinir Kepala Desa/Lurah untuk dapat menginformasikan kepada masyarakat yang menerima bantuan tersebut, lalu kepala desa menugaskan kepala dusun untuk mendukung TKSK dan pendamping PKH dalam penyampaian undangan bantuan seperti PKH kepada keluarga penerima. Program PKH memberikan bantuan uangtunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan catatan mengikuti persyaratan yang diwajibkan.

Tugas pokok seorang kepala desa yaitu kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Kepala desa juga menjalankan tugas dari pemerintahan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyalurkan bantuan PKH kepada masyarakat. Dengan itu, kepala desa menjalankan SOP Program Keluarga Harapan (PKH) seperti : penerimaan dan pendaftaran, verifikasi dan seleksi, pendataan dan penyaluran bantuan, pengawasan dan evaluasi, pelaporan, dan koordinasi dan kolaborasi. Dari tugas pokok dan SOP Program Keluarga Harapan (PKH) akan dilihat bagaimana kepala desa menerapkannya di Desa Sei Rotan yang akan di bahas didalam penelitian ini.

Strategy Directing Kepala Desa Dalam Pendataan...

Rezekina S, Amrizal D (2024)

Desa Sei Rotan adalah desa di kecamatan percut sei tuan, kabupaten deli serdang, Sumatera Utara yang berdiri sejak 1961. Desa Sei Rotan yang dipimpin oleh kepala desa yaitu Bapak Suwansi MS. Desa Sei Rotan merupakan pemekaran dari kampung sei rotan yang sebelumnya adalah perkebunan tembakau PTP-IX. Sesuai dengan ketentuan UU No.5 Tahun 1979, kampung sei rotan ditingkatkan menjadi Desa Sei Rotan. Pada masa itu mengadaan penataan wilayah Desa Sei Rotan terdiri dari 12 dusun, 12 RT dan 6 RW dengan jumlah penduduk 1.820 jiwa yang tergabung dalam 472 kepala penduduk. Pada saat ini menurut RPJMDES tahun 2016-2021 Desa Sei Rotan mengalami penambahan penduduk yang terus meningkat menjadi 25.619 jiwa yang tergabung dalam 6.323 kepala penduduk.

Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sei Rotan mulai aktif kembali dijalankan pada 5 tahun terakhir ini. Desa Sei Rotan mempunyai 13 dusun, dengan itu program PKH ini berjalan pada setiap dusun di Desa Sei Rotan. PKH tersalurkan di seluruh dusun berupa bantuan tunai yang di berikan kepada masyarakat yang tidak mampu. Sebelum menerima bantuan PKH masyarakat harus memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditentukan pemerintah. Kriteria yang di pilih kepala desa untuk layak mendapat kan bantuan PKH ini adalah termasuk keluarga miskin atau pra sejahtera, memiliki anggota keluarga dengan kriteria ibu hamil/menyusui, memiliki anak dengan kategori pendidikan SD, SMP, SMA sederajat, memiliki keluarga lanjut usia minimal 60 tahun, penyandang disabilitas berat. Persyaratan berkas yang berlaku untuk di penuhi oleh masyarakat tidak mampu ialah fotocopy kartu keluarga, fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) yang dimiliki oleh masyarakat dan materai 1 Lembar.

Dengan berjalannya program bantuan tersebut ternyata masih menimbulkan kontra kepada masyarakat. Proses penyaluran penggunaan dana bantuannya oleh peserta PKH juga masih banyak mengalami kendala dan kelemahan (Fajriati et al., 2020). Adanya pengakuan masyarakat bahwa masih ada masyarakat tidak mampu yang tidak mendapatkan program bantuan sosial ini. Tak hanya itu, sebagian masyarakat juga mempertanyakan terkait nominal bantuan PKH yang berbeda disetiap dusun. Beberapa cara *strategy directing* yang dilakukan kepala desa masih terdapat cara yang relatif belum efektif dilaksanakan. Dilihat dari permasalahan di atas kepala desa belum sepenuhnya bisa meyakinkan bawahannya untuk bekerja sesuai perencanaan yang ditetapkan sehingga program bantuan PKH belum berjalan sesuai tujuan yang ingin dicapai

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan analisis data kualitatif, yaitu penelitian dengan teknik pengumpulan data melalui teknik wawancara dengan menjadikan manusia sebagai instrument dan di sesuaikan dengan situasi yang wajar dengan

kaitannya dengan pengumpulan data pada umumnya bersifat kualitatif. Menurut Arikunto (2014) bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.

Menurut Sugiono (2017) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Alasan peneliti menggunakan metode deskriptif dengan analisis data kualitatif adalah peneliti ingin mendeskripsikan keadaan yang akan diamati dilapangan dengan lebih spesifik, transparan, dan lebih mendalam. Dengan tujuan untuk menggambarkan situasi sehingga data yang akan terkumpul bersifat deskriptif untuk mengidentifikasi pengarah program keluarga harapan (PKH) dengan pendataan yang efektif. Lokasi penelitian dilakukan di kantor Kepala Desa Sei Rotan Jalan Pendidikan II Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kab Deli Serdang Sumatera Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Permensos Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di dalam permansos ini juga menjelaskan urutan pelaksana yang dilakukan sehingga bantuan sosial seperti PKH sampai kepada masyarakat. Pelaksana PKH daerah dilakukan oleh dinas sosial daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang menangani Bantuan Sosial PKH, perlindungan, dan jaminan sosial. Pelaksana PKH daerah kecamatan bertanggung jawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasi PKH di kelurahan/desa. Lalu untuk melanjutkan pelaksanaan PKH dalam perm ansos di atas dilanjutkan dengan surat keterangan dari Dinas Sosial No.460/2916/2022 perihal dukungan penyaluran BNBA BLT BBM, BPNT, PKH tambahan. Dalam surat ini dijelaskan kecamatan mengkoordinir Kepala Desa/Lurah untuk dapat menginformasikan kepada masyarakat yang menerima bantuan tersebut, lalu kepala desa menugaskan kepala dusun untuk mendukung TKSK dan pendamping PKH dalam penyampaian undangan bantuan seperti PKH kepada keluarga penerima. Program PKH memberikan bantuan uangtunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan catatan mengikutipersyaratan yang diwajibkan.

Menurut Siswanto dalam Maryati et al (2022) pengarah adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan pemberian perintah dan saran. Begitu juga halnya dengan Amir dalam (Wirawan & Tripalupi, 2021) pengarah (*directing*) adalah membuat pegawai mengerjakan apa

Strategy Directing Kepala Desa Dalam Pendataan...

Rezekina S, Amrizal D (2024)

yang seharusnya dikerjakan dan memotivasinya untuk mencapai tujuan organisasi, ada yang mengatur, mengarahkan, memotivasi, memberikan sangsi dan lain-lain.

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara yang dapat digunakan dalam *Strategy Directing* dan diletakkan didalam kategorisasi penelitian ini sebagai berikut : Adanya pemberian perintah dalam Program Keluarga Harapan (PKH), Adanya pelimpahan sebagian wewenang oleh pemimpin, Adanya aktivitas pengarahan dari pimpinan, Pemberian motivasi dari pimpinan. Dari beberapa kategorisasi tersebut dijadikan sebuah pertanyaan wawancara yang telah dilakukan. Dari beberapa kategorisasi di atas dapat dilihat dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) relatif berjalan dengan baik.

Dalam adanya pemberian perintah dalam Program Keluarga Harapan (PKH) pengarahan yang dilakukan oleh kepala desa kepada kepala dusun relatif berjalan dengan baik. Kepala dusun yang melaksanakan pengarahan sesuai dengan aturan sehingga pendataan untuk penerima bantuan PKH dapat dilaksanakan. Tak hanya pengarahan yang telah dilaksanakan oleh kepala dusun, terkadang kepala dusun juga melaksanakan kegiatan dari pelimpahan wewenang yang diberikan oleh kepala desa. Tugas yang diberikan kepala desa dalam pelimpahan wewenang biasanya diluar dari konteks pendataan penerima bantuan PKH. Kepala desa tak hanya sekedar memberikan pengarahan dan pelimpahan wewenang kepada kepala dusun, kepala desa juga mengevaluasi dan selalu memeriksa kinerja kepala dusun.

Kepala desa biasanya memberikan pengarahan kepada kepala dusun di saat apel pagi yang rutin dilaksanakan pada setiap hari Selasa pagi. Di saat apel pagi kepala desa selalu mengarahkan kepala dusun untuk selalu mengingatkan kepada penerima PKH untuk menggunakan hasil dari PKH dipergunakan dengan baik dan menggunakan untuk membangun usaha kecil-kecilan guna untuk manfaat berkepanjangan. Tetapi kepala dusun belum sepenuhnya bisa mempengaruhi dan meyakinkan para penerima bantuan PKH untuk menggunakan hasil dari bantuan PKH sebagai modal usaha, kebanyakan penerima bantuan PKH menggunakan hasil PKH untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk kebutuhan anak sekolah.

Pemberian motivasi dan semangat kerja kepada kepala dusun diperlukan untuk menambah kualitas kinerja kepala dusun dalam pendataan penerima bantuan PKH maupun melaksanakan tugas lain dari kepala desa. Motivasi yang sering diberikan oleh kepala desa adalah selalu mengingatkan untuk selalu membangun kerjasama antara kepala desa dan kepala dusun, dan memberikan kegiatan yang membuat rasa kebersamaan dan kepedulian satu sama lain antara kepala desa dan kepala dusun terjalin baik. Kegiatan motivasi dan semangat yang dilakukan ialah melakukan gotong royong bersama setiap 1 bulan sekali, melaksanakan shalat jum'at bersama, dan menjaga keamanan bersama di setiap dusun nya.

Dilihat dari masalah yang ada dalam latar belakang penelitian yaitu masih terdapat masyarakat yang tidak terpilih dalam pendataan bantuan PKH dan Perbedaan jumlah nominal yang dialami beberapa masyarakat di dusun yang sama maupun berbeda. Setelah dilakukan nya wawancara kepada informan dalam penilitan ini, mendapatkan beberapa pernyataan yang bisa menjawab dari permasalahan penelitian ini, yaitu : masalah masih ada nya masyarakat yang tidak menjadi penerima bantuan PKH atau tidak lolos dalam seleksi pendataan penerima PKH. Sehingga, Peran pendamping PKH menjadi sangat penting karena mayoritas Penerima dana PKH merupakan RTSM yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah sehingga membutuhkan fasilitas pendampinga (Domri et al., 2019).

Dalam hal ini kepala desa dan kepala dusun sudah melakukan pendataan menyeluruh di semua masyarakat seluruh dusun Desa Sei Rotan, tetapi yang mempunyai wewenang untuk memilih berapa dan nama-nama penerima bantuan PKH ialah dinas sosial, pihak desa hanya sebagai perantara penyaluran data nama-nama masyarakat yang berkriteria sebagai penerima bantuan PKH. Setelah memilih data dan nama penerima bantuan PKH dinas sosial tetap melakukan survey kepada masyarakat penerima bantuan PKH. Untuk perbedaan jumlah nominal yang diterima oleh masyarakat juga kebijakan dinas sosial untuk menentukan berapa jumlah nominal. Dengan itu pihak desa dan kepala dusun tetap memberikan penjelasan yang baik dan jelas kepada masyarakat bagaimana bisa terjadi perbedaan jumlah nominal yang di dapatkan di setiap dusun nya. Bukan di karenakan kebijakan pihak desa maupun kepala dusun, pihak desan tidak mnegetahui sama sekali berapa nominal seluruh penerima bantuan PKH dikarenakan semua masyarakat penerima bantuan PKH telah memiliki kartu PKH dan buku rekening untuk media penerimaan bantuan PKH. Pihak desa dan kepala dusun hanya mendata dan mengusulkan nama-nama masyarakat yang memenuhi kriteria penerima PKH.

Dengan itu masalah yang ada dalam masyarakat penerima bantuan PKH tidak dikarenakan pihak desa atau kepala dusun masing-masing. Masih di perlukan tindak lanjut yang dilakukan pihak desa terhadap dinas sosial untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Dan juga di harapkan dengan ada nya pernyataan-pernyataan atas masalah ini pihak desa bisa mendiskusikan dengan dinas sosial.

KESIMPULAN

Strategy directing yang digunakan dalam penilitian ini berjalan dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan Adanya pemberian perintah dalam Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilakukan sehingga dapat meningkatkan kinerja kepala dusun. Adanya Pelimpahan sebagian wewenang oleh pemimpin, Kepala dusun menerima pelimpahan sebagian wewenang yakni

Strategy Directing Kepala Desa Dalam Pendataan...

Rezekina S, Amrizal D (2024)

selalu menghimbaukan kepada masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan dengan kegiatan gotong rpyng yang dilaksanakan sebulan sekali dan rutin di evaluasi oleh kepala desa melalui laporan yang diberikan oleh kepala dusun. Adanya aktivitas pengarahan dari pimpinan yaitu bermanfaat dalam kinerja kepala dusun apabila dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dengan itu masyarakat juga dapat merasakan manfaat yang ditimbulkan dengan kinerja kepala dusun yang relatif baik. Adanya pemberian motivasi dari pimpinan adalah usaha kepala desa dalam memotivasi dan memberi semangat kepada kepala desa relatif baik, dapat dilihat dari dilaksanakan kegiatan-kegiatan positif yang diberikan kepala desa kepada kepala dusun untuk memotivasi dan memberi semangat kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2014). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Rineka Cipta.
- Ayun, Y. Q., Safei, A. A., & Azis, A. (2021). Peran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga. *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 6(2), 167–186. <https://doi.org/10.15575/tamkin.v6i2.24051>
- Domri, Ridwan, & Jaya, M. (2019). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 1. <https://doi.org/10.55606/jass.v5i1.929>
- Fajriati, N. I., Isnaeni, N., & Ridhwan, R. (2020). Analisis Pengaruh Program Keluarga Harapan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin (Studi Kasus Di Kecamatan Tungkal Ilir). *Najaha Iqtishod: Journal of Islamic Economic and Finance*, 1(1), 43–50. <https://doi.org/10.22437/jief.v1i1.11198>
- Maryati, S., Handriadi, H., Oktaviani, N. D., Hamboer, M. J. E., & Pranawukir, I. (2022). Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka dalam Mewujudkan Tujuan Pendidikan Islam di SMPN 29 Palembang. *Sustainable Jurnal Kajian Mutu Pendidikan*, 5(2), 385–396. <https://doi.org/10.32923/kjimp.v5i2.2964>
- Sinurat, R. P. P. (2023). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Registratie*, 5(2), 87–103. <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v5i2.3554>
- Sugiono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. cv alfabeta.
- Wirawan, P. A., & Tripalupi, L. E. (2021). Pengelolaan Bank Sampah “Sampat Sehe Kedas” Desa Selat, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 13(1), 126. <https://doi.org/10.23887/jjpe.v13i1.32103>
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan